



PEMERINTAH  
KOTA MAKASSAR



DISDAG  
KOTA MAKASSAR

# LKJIP 2021

DINAS PERDAGANGAN  
KOTA MAKASSAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, hidayah dan kemudahan yang diberikan kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Dinas Perdagangan Kota Makassar dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan pada bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian sekaligus untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai instrument untuk menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar tahun 2021 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2021, sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar tahun 2021 yang merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan ini dapat memberikan gambaran dan menjadi bahan evaluasi terhadap apa yang telah di kerjakan dalam kurun waktu tahun 2021 terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perdagangan Kota Makassar tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2021. Harapan kami, kiranya laporan ini dapat menjadi salah satu bahan dalam menyusun kegiatan dan program di tahun 2022 mendatang, sehingga

senantiasa berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang termuat di dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 – 2026.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan tenaga dan pikirannya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 dapat disusun dengan baik, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan semakin memacu kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar di masa yang akan datang.

Makassar, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA MAKASSAR**

**ARLIN ARIESTA, S.STP M.Si**  
**Pangkat : Pembina Tingkat I**  
**NIP: 19770411 199511 1 002**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perdagangan Kota Makassar merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar dengan penjabaran kedudukan, tugas dan fungsi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 104 Tahun 2016. Pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada 5 (lima) sub urusan bidang perdagangan yang terdapat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Pengembangan Ekspor; dan
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Dan selanjutnya 3 (tiga) sub urusan bidang Perindustrian, yaitu :

1. Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2. Perizinan
3. Sistem Informasi Industri Nasional

Dalam rangka keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi, difokuskan kegiatan yang sejalan dengan program prioritas, untuk dijadikan pedoman langkah bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi agar betul-betul mampu menjadi bagian proses percepatan terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar.

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai setiap tahunnya, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja dari (dua belas) sasaran strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar pada tahun 2021 adalah sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis berkategori tinggi sampai sangat tinggi dan 2 (dua) sasaran strategis lainnya

berkategori sangat rendah serta 3 (tiga) sasaran strategis yang NIHIL karena adanya refocusing anggaran dan kegiatan pada masa pandemic COVID-19, yaitu:

1. Sasaran Strategis “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pendaftaran Perusahaan” dengan realisasi kinerja pada indikator 73,63 % dengan tingkat capaian Tinggi.
2. Sasaran Strategis adalah “Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)” dengan target kinerja 1 unit. Adapun realisasi kinerja pada indikator ini 0 % dengan tingkat capaian NIHIL.
3. Sasaran Strategis “Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik” dengan target kinerja terkendalinya harga bahan kebutuhan pokok di 10 pasar pasar tradisional. Adapun capaian pada indikator adalah 100 % dengan tingkat capaian Sangat Tinggi.
4. Sasaran strategis “Cakupan Bina Kelompok Perdagangan” dengan indikator kinerja jumlah Produk usaha Informal yang di promosikan dengan capaian pada indikator program ini adalah 0 % dengan realisasi anggaran NIHIL.
5. Sasaran strategis “Ekspor Bersih Perdagangan” target capaian kinerja - 600.000.000 \$US dengan capaian pada indikator program ini adalah 42,17 % dengan predikat capaian Rendah.
6. Sasaran Srategis “Cakupan Pelayanan Kemetrolagian” dengan target 75% dari 1500 alat UTP yang ada di kota Makassar dengan capaian pada indikator program ini adalah 35,29 % dengan predikat capaian Rendah.
7. Sasaran strategis “Cakupan Bina Kelompok Industri Kecil Menengah” dengan capaian pada indikator program ini adalah 100% atau dengan predikat capaian Sangat Tinggi.
8. Sasaran Strategis “Persentase Perencanaan Dan Pembangunan Industri Yang Dimanfaatkan” dengan capaian pada indikator program ini adalah 100% atau dengan predikat capaian Sangat Tinggi.

9. Sasaran strategis “Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah” dengantingkat capaian 90% atau kategori Tinggi.
10. Sasaran strategis “Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan” dengantingkat capaian 90% atau kategori Tinggi.
11. Sasaran strategis “Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas’ dengan capaian kinerja 0 % atau NIHIL.
12. Sasaran strategis “Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik” yang dengan capaian 90 % atau kategori Sangat Tinggi

Sasaran strategis tersebut kemudian di laksanakan dalam 9 (sembilan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.551.214.253.- (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar pada tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Dan Bahan Penting
5. Program Pengembangan Eksport
6. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
8. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota.

Untuk mencapai sasaran strategis dan kinerja kegiatan yang lebih optimal, diperlukan dukungan dan peran aktif seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kota Makassar, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar dan sebagai

perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan *good governance* dan *clean government* merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu maka diperlukan pelaksanaan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan berlegitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, Maka Pemerintah telah mengeluarkan Tap MPR R.I. Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Pemerintah juga telah mendorong terwujudnya *good governance* dikalangan instansi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas, dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021, disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah daerah kabupaten / kota memiliki kewenangan di bidang perdagangan dan perindustrian yang mencakup 5 (lima) sub urusan, yaitu :

1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan
2. Sarana distribusi perdagangan
3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
4. Pengembangan ekspor
5. Standardisasi dan perlindungan konsumen.

Sedang pada bidang industri mencakup 3 (tiga) sub urusan, yaitu :

1. Perencanaan pembangunan industri
2. Perizinan
3. Sistem Informasi industri nasional.

Pada sub bagian perizinan dan pendaftaran perusahaan, Dinas Perdagangan diantaranya penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan, penerbitan antanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Wara laba ( STPW), penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten / kota, rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan ekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten / kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbitan surat keterangan asal).

## A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah lembaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan urusan pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan. Pembentukan Dinas Perdagangan Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### 1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### 2. Fungsi

Dinas Perdagangan Kota Makassar mempunyai fungsi :

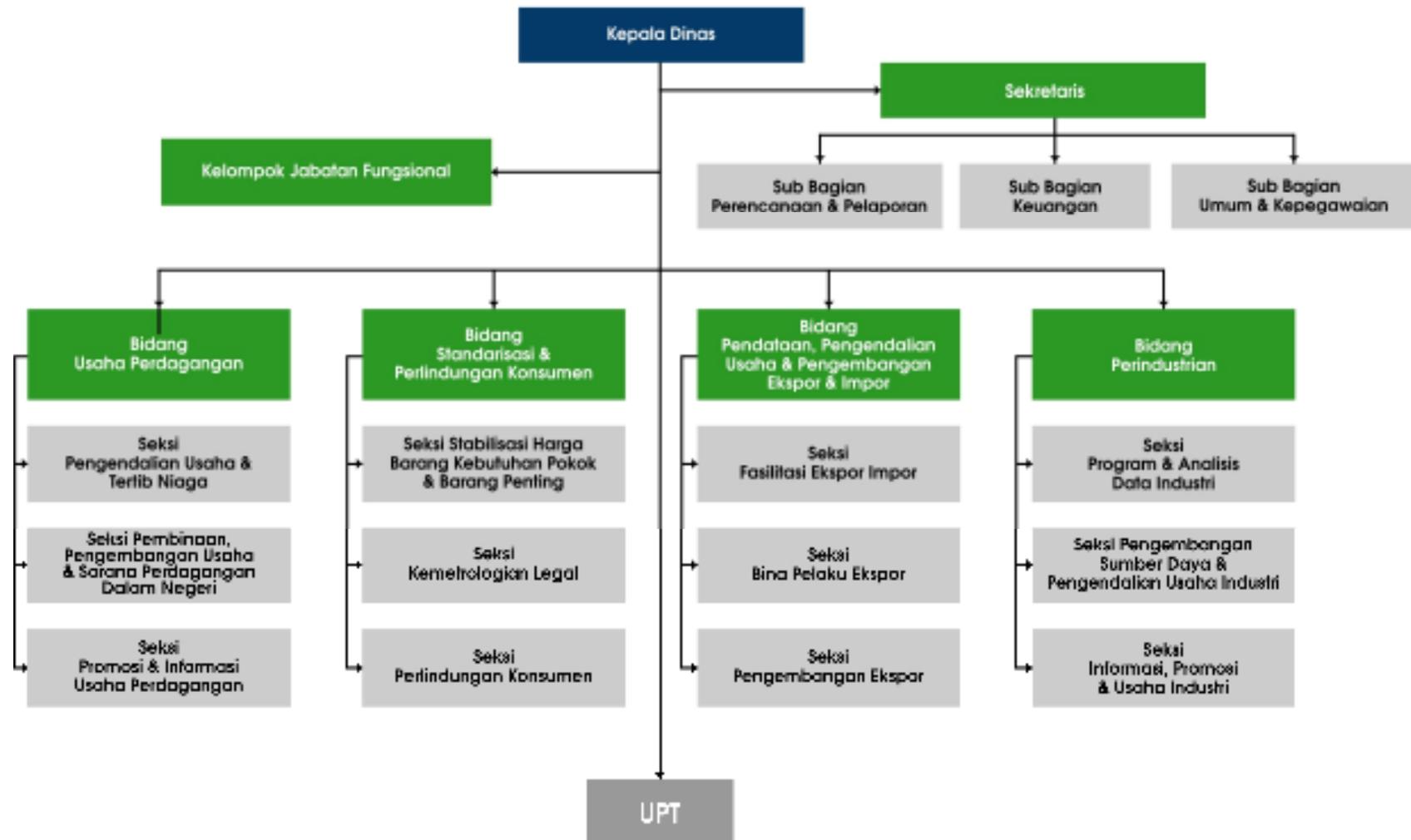
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan perindustrian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka dibentuklah susunan organisasi Dinas Perdagangan Kota Makassar yang terdiri

dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Perindustrian, Bidang Usaha Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian dan Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian. Selain itu juga didukung dengan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Pengolahan Kulit, dan UPTD Metrologi Legal. (Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kota Makassar secara lengkap disajikan pada lampiran I dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini)



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR



## **B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD**

Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki sejumlah permasalahan dan isu strategis yang harus dipecahkan dan diantisipasi yaitu sebagai berikut :

### **1. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini adalah:

- a. Belum optimalnya perencanaan maupun kajian dan analisa yang disusun oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar baik secara internal maupun oleh dinas teknis terkait;
- b. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan Implementasi kinerja yang rendah, sehingga sangat berpengaruh atas realisasi pencapaian kinerja;
- c. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim;
- d. Belum tersusunnya Standard Pelayanan Minimal yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta Pemahaman pelaksana tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai di lingkup Dinas Perdagangan Kota Makassar masih rendah;
- e. Belum optimalnya penyusunan anggaran dan pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM dan Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).

### **2. Isu Strategis**

Isu-isu strategis berupa peluang yang dapat di manfaatkan agar membawa keuntungan di masa depan adalah sebagai berikut:

**IDENTIFIKASI ISU – ISU STRATEGIS**

DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL	LAIN-LAIN
Pemulihan Ekonomi Negara - negara maju	Terselenggaranya event promosi dan pameran tingkat nasional sebagai ajang pengenalan produk unggulan	Fasilitasi promosi dan pameran pemanfaatan produk unggulan daerah	
- Perluasan Pasar Non Tradisional - Diversifikasi Produk Ekspor	Tersedianya pelaku usaha yang handal dan berkualitas	- Peningkatan kesejahteraan rakyat - Perluasan pasar domestik	
Perubahan Iklim		Perbaikan infrastruktur	
Munculnya Raksasa Ekonomi Baru		Peningkatan kemampuan teknologi	
Pasar Bebas		Peningkatan nilai tambah produk industri	
Persaingan global		- Penerapan industri berwawasan lingkungan - Pemanfaatan teknologi terbaru - Penciptaan lapangan kerja - Pemberantasan produk ilegal - penerapan SNI	

### C. RENCANA STRATEGIS SKPD

Sebagai upaya untuk mengatasi seluruh permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategis diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka Dinas Perdagangan Kota Makassar telah menetapkan sasaran kinerja, strategi dan kebijakan serta program-program sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS	SASARAN KINERJA	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4
- Perluasan pasar non tradisional - Perluasan pasar domestik - Perbaikan infrastruktur - Peningkatan kesejahteraan	Menjadikan pelaku usaha dan stake holder lainnya sebagai pengusaha yang professional di bidangnya	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima yang berbarengan dengan peningkatan sentra- sentra produk local dalam mengembangkan industri kreatif	a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri b. Program Pembinaan Pedagang Kaki

PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS	SASARAN KINERJA	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rakyat</li> <li>- Tersedianya pelaku usaha yang handal dan berkualitas</li> </ul>		tradisional	Lima dan Asongan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar Bebas</li> <li>- Diversifikasi Produk Ekspor</li> <li>- Perluasan pasar non tradisional</li> <li>- Perluasan pasar domestik</li> </ul>	Menjadikan pasar, baik dalam maupun luar negeri sebagai satu – satunya sarana yang mampu meningkatkan ekonomi pelaku usaha	Memberikan kepastian dan payung hukum yang jelas dan transparan terhadap pelaku usaha khususnya pada sector perdagangan sebagai pedoman dalam mengembangkan dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</li> <li>b. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesejahteraan rakyat</li> <li>- Penerapan industri berwawasan lingkungan</li> <li>- Penciptaan lapangan kerja</li> <li>- Peningkatan kemampuan teknologi</li> <li>- Peningkatan nilai tambah produk industri</li> <li>- Pemanfaatan teknologi terbarukan</li> </ul>	Menjadikan industri sebagai salah satu basis utama dalam menunjang pembangunan regional yang berwawasan lingkungan	Membuat zona - zona industri berdasarkan struktur kehidupan ekonomi kerakyatan yang ramah dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan produk ilegal</li> <li>- Penerapan SNI</li> </ul>	Menjadikan konsumen yang tahu dan mengerti tentang hak – hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.	Senantiasa melakukan kajian - kajian dan sosialisasi terhadap penguatan struktur ekonomi yang mengerti dan memahami tentang hak - hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> </ul>

Secara lengkap, muatan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 disajikan dalam Lampiran II pada dokumen ini.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA



Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Makassar dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut di susunlah Perjanjian Kinerja.

Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dalam format formulir yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang di inginkan dari setiap sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat *outcome*.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 yang telah di tanda tangani baru pada target capaian *output*. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 telah menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja. Target kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	2	4	7

1	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pendaftaran Perusahaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah izin usaha yang difasilitasi</li> <li>- Jumlah gudang yang di fasilitasi dan di awasi</li> <li>- Terasilitasinya izin waralaba</li> <li>- Izin usaha tempat minol yang terbit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 340 Unit usaha</li> <li>- 440 Unit</li> <li>- 460 Unit</li> <li>- 110 Unit</li> </ul>
2	<b>Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (Sni)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya pasar rakyat yang berstandar nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Unit</li> </ul>
3	<b>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkendalinya harga bahan kebutuhan pokok di pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Pasar</li> </ul>
4	<b>Cakupan Bina Kelompok Perdagangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk usaha Informal yang di promosikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Usaha</li> </ul>
5	<b>Ekspor Bersih Perdagangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Kota Makassar yang diselenggarakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 Usaha</li> </ul>
6	<b>Cakupan Pelayanan Kemetrolgian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkalibrasinya alat alat ukur yang digunakan oleh pelaku usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1500 PUTTP</li> </ul>
7	<b>Cakupan Bina Kelompok Industri Kecil Menengah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya nilai produksi IKM yang mendapat binaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 350 IKM</li> </ul>
8	<b>Persentase Perencanaan Dan Pembangunan Industri Yang Dimanfaatkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terasilitasinya perizinan bagi usaha Industri Kecil dan Menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 Usaha</li> </ul>
9	<b>Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Dokumen</li> </ul>
10	<b>Indeks Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan Dan Keuangan)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran gaji dan tunjangan ASN</li> <li>- Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 Bulan</li> <li>- 100 %</li> </ul>

11	<b>Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</b>	- Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	- 121 Pasang
12	<b>Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran / umum yang disediakan	- 100 %

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 secara lengkap disajikan pada Lampiran III pada dokumen ini.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 di atas terdapat 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator kinerja utama dan di dukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 29.551.214.253.- (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).**

Sasaran strategis tersebut kemudian di laksanakan dalam 9 (sembilan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan . Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar pada **tahun 2021** adalah :

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Rp. 10,497,368,528.00 ( Sepuluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah )
11. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Rp. 530.393.600,- ( Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah )
12. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 300.000.000- ( Tiga Ratus Juta Rupiah )
13. Program Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Dan Bahan Penting Rp.16.342.450.000 ( Enam Belas Milyar Tyiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima PULuh Ribu Rupiah )
14. Program Pengembangan Ekspor Rp.184.739.200,- (Serratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

15. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Rp. 235.432.400,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
16. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Rp. 0 ( Nol Rupiah
17. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Rp. 1.219.057.725,- ( Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah )
  
18. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota Rp. 241.772.800 ( Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah )

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA SKPD

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan berpedoman kepada DPA TA 2021 serta DPA Perubahan Tahun TA 2021 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh perangkat kerja SKPD Dinas Perdagangan Kota Makassar. Diharapkan bahwa dari hasil keseluruhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi poin tambahan yang dapat membantu secara signifikan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Makassar serta Dinas Perdagangan Kota Makassar secara keseluruhan. Diharapkan secara umum mampu meningkatkan serta mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat baik di tingkat propinsi maupun skala nasional.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pendaftaran Perusahaan

- 1.1. Capaian sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pendaftaran Perusahaan” yang diukur melalui 4 (Empat) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah izin usaha yang difasilitasi	unit	340	170	50 %
Jumlah gudang yang di fasilitasi dan di awasi	unit	440	110	25 %

Terfasilitasinya izin waralaba	unit	460	14	4 %
Izin usaha tempat minol yang terbit	unit	110	52	48 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>				<b>32%</b>

Sasaran pada program ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pendaftaran Perusahaan dengan target kinerja sebesar 100 %, Adapun realisasi kinerja pada indikator ini masih 73,63 % dengan tingkat capaian sedang. Adapun realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Program tersebut adalah sebesar Rp. 358.354.964,- dari anggaran sebesar Rp. Rp. 530.393.600 atau sebesar 67,56 %

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan Kegiatan :

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan;
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri;
4. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat.

## 2 *Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)*

- 2.1.** Capaian sasaran “*Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)*” yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
- Tersedianya Pasar Rakyat yang berstandar Nasional	Unit	1	0	0%
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>				<b>0 %</b>

Sasaran kedua adalah Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)” dengan target kinerja 1 unit Adapun realisasi kinerja pada indikator ini 0 % dengan tingkat capaian NIHIL. Adapun realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Program tersebut adalah NIHIL karena dilakukan Refocusing dalam rangka penanganan Covid-19 dan lakukan perubahan Kegiatan menjadi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Smart Pasar Rakyat yang berstandar Nasional.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Pada Perubahan Anggaran Tahun 2021 dilakukan perubahan kegiatan dengan target kinerja Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik dengan target capaian 8,3 % untuk realisasi pada indikator program ini masih 8,3 % atau tingkat capaian 100 % adapun realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 297.171000 dari anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan tingkat capaian Sangat Tinggi.

### 3

#### PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DALAM KONDISI BAIK

- 3.1. Capaian sasaran “**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik**” yang diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkendalnya harga bahan kebutuhan pokok di pasar	unit	10	10	100 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>				<b>100%</b>

Sasaran ketiga **Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik** dengan target kinerja Terkendalnya harga bahan kebutuhan pokok di 10 pasar pasar tradisional.

Adapun capaian pada indikator adalah 100 %. Untuk pencapaian pada program ini didukung oleh satu kegiatan yaitu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Pada Perubahan Anggaran Tahun 2021 dilakukan perubahan kegiatan dengan target kinerja Persentase Barang Penting dengan Harga Stabil dengan target kinerja sebesar 73,33 % dari 11 jenis barang penting. Adapun capaian pada indikator program ini adalah 73,33 %.

Adapun realisasi keuangan pada Program ini sebesar Rp. 167.423.500,- dari Anggaran sebesar Rp. 16.342.450.000 atau 1,02 %. Dimana kegiatan Pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

## 4

### CAKUPAN BINA KELOMPOK PERDAGANGAN

- 4.1. Capaian sasaran **CAKUPAN BINA KELOMPOK PERDAGANGAN** yang diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Produk usaha Informal yang di promosikan	Unit usaha	4	0	0
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN				0 %

Sasaran **CAKUPAN BINA KELOMPOK PERDAGANGAN** dengan indikator kinerja jumlah Produk usaha Informal yang di promosikan dengan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri.

Adapun capaian pada indikator program ini adalah 0 % dengan realisasi anggaran NIHIL. Anggaran pada kegiatan ini lalukan refocusing karena tidak ada kegiatan Promosi Produk tingkat Provinsi karena

## 5

## EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN

Pandemi COVID-19.

- 5.1. Capaian sasaran “**Ekspor Bersih Perdagangan** yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Kota Makassar yang diselenggarakan	usaha	60	26	42,17 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>				<b>42,17 %</b>

Sasaran Ekspor Bersih Perdagangan target capaian kinerja -600.000.000 \$US dengan melalui Program Pengembangan Ekspor. Program ini diarahkan pada peningkatan Nilai Ekspor yang dilihat dari pencapaian indikator nilai ekspor non migas.

Adapun capaian pada indikator program ini adalah 42,17 % dengan perdiket capaian **Rendah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 181.904.328 dari anggaran sebesar Rp. 184.739.200,- atau 98,47 % Pencapaian pada program ini didukung oleh (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan tiga (3) subkegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
2. Pameran Dagang Nasional
3. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

## 6 CAKUPAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN

- 6.1. Capaian sasaran “**CAKUPAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN**” yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkalibrasinya alat alat ukur yang digunakan oleh pelaku usaha	UTTP	1.125	397	35.29%
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>				<b>35.29%</b>

Cakupan Pelayanan Kemetrolagian dengan target 75% dari 1500 alat UTTP yang ada di kota Makassar. Adapun capaian pada indikator program ini adalah 35,29 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.752.785 dari anggaran Sebesar Rp. 235.432.400,- atau 83,15 % dengan tingkat capaian rendah. Pada Program ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

## 7

**CAKUPAN BINA KELOMPOK INDUSTRI KECIL MENENGAH**

- 7.1. Capaian sasaran “**CAKUPAN BINA KELOMPOK INDUSTRI KECIL MENENGAH**” yang diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya nilai produksi IKM yang mendapat binaan	usaha	350	245	70%

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	70%
---------------------------	-----

Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan Bina Kelompok Industri Kecil Menengah dengan target kinerja 70 %. Adapun capaian pada indikator program ini adalah 100, % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.058.523.562,- dari anggaran Sebesar Rp. 1.219.057.875,- atau 86,83 %. Sehingga capaian kinerja pada program ini **Sangat Tinggi**. Capaian pada program ini diukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

## 8 PERSENTASE PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG DIMANFAATKAN

- 8.1.** Capaian sasaran PERSENTASE PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG DIMANFAATKAN yang diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terfasilitasinya perizinan bagi usaha Industri Kecil dan Menengah	usaha	100	100	100%

<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>	<b>100%</b>
----------------------------------	-------------

Adapun capaian pada indikator program ini sampai tri Wulan IV adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.192.399.352,- dari anggaran Sebesar Rp. 241.772.800,- atau 79,58 %. Sehingga capain kinerja pada program ini Tinggi. Capaian pada program ini diukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IKUI dan IPKI kewenangan Kapbupaten/Kota.

## **9 PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

- 9.1.** Capaian sasaran PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH yang diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	dokumen	7	7	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>				<b>100%</b>

Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah. Pada indikator ini realisasi capaian kinerja dari target terealisasi

100 % dari target kinerja untuk tahun 2021 sebesar 100 % dengan tingkat capaian 90 %.

10

### INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN)

**10.1.** Capaian sasaran indeks kepuasan asn perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan keuangan) yang diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-Pembayaran gaji dan tunjangan ASN -Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	90	90%
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>				<b>100%</b>

Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, dan Keuangan) untuk indikator ini capaian kinerja 90 % dari target 90 %.

11

### PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS

**11.1.** Capaian sasaran PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS yang diukur melalui 1 (Satu)

indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	pasang	121	0	0%
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>				<b>0%</b>

Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, untuk indikator ini capaian kinerja 0 % karena kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya melalui Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak terlaksana.

## 12 PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK

12.1. Capaian sasaran **PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK** yang diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelayanan administrasi perkantoran / umum yang disediakan	persen	100	90	90%
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>				<b>0%</b>

Persentase pelayanan administrasi perkantoran / umum yang disediakan dengan capaian 90 %.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi capaian keuangan Dinas Perdagangan Kota Makassar sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Operasi</b>	29.484.414.253	12.282.903.376	<b>41.56%</b>
	- Belanja Pegawai	9.324.094.528	8.723.108.099	93.55
	- Belanja Barang dan Jasa	20.160.319.725	3.559.795.277	17.63
	- Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Modal	66.800.000	42.000.000	62.87
	- Belanja modal			
	<b>Jumlah</b>	<b>29.551.214.253,-</b>	<b>12.324.903.376</b>	<b>41.70</b>

Realisasi belanja tahun 2021 sebesar **Rp.12.324.903.376** atau **41.70 %** dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp.29.551.214.253** terdiri dari realisasi belanja Operasi sebesar **Rp. 12.282.903.376** atau **41.56%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 29.484.414.253** dan realisasi belanja Modal sebesar **Rp. 42.000.000** atau **62.87 %** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.66.800.000,-**

Realisasi belanja tidak langsung sebesar **Rp.9.406.354.528,-** merupakan realisasi belanja pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perdagangan Kota Makassar. Sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.675.252.160** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.114.971.5673,-**, terdiri dari

Belanja Pegawai sebesar Rp.8.723.108.099 rupiah. Dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.66.800.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp.42.000.000,-

## BAB IV PENUTUP

Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan urusan pembinaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pembentukan Dinas Perdagangan Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 tahun 2021 sebagai perubahan dari perwali nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan Kota Makassar.

Ada beberapa permasalahan terhadap beberapa kegiatan dan capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 ini terkait dengan pelaksanaan teknis pekerjaan. Akan tetapi, akuntabilitas kinerja seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa capaian kinerja telah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar, namun ada yang masih pada tataran *output*. Untuk mencapai *ultimate outcome* (dampak) yang dirasakan oleh masyarakat perlu diadakan evaluasi dan penelitian lapangan (*survey*) lebih lanjut.

Secara umum, target kinerja sasaran Dinas Perdagangan Kota Makassar yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kerja (PK) Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 sudah memadai dalam mendukung terwujudnya sasaran strategis Kota Makassar walaupun dalam kondisi di tengah Pandemi. Adapun penyebab tidak terlaksananya kegiatan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Lambatnya pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan dari pihak penyelenggara.
2. Adanya refocusing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
3. Preparasi untuk setiap kegiatan promosi / pameran membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang cukup memadai, faktanya bidang industri sebagai pelaksana sedang mengalami kekurangan tenaga pendukung di lapangan.

LAKIP Tahun 2021 ini kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi bagi Pemerintah Kota Makassar pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan atau sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat Kota Makassar. Bagi Dinas Perdagangan Kota Makassar, laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN





LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021										Perkiraan Maju Tahun 2022		Jenis Kegiatan
			Kelompok Sasaran		Lokasi Output Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	(a/b/c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									16.347.389.475	12.090.328.720				19.448.543.620	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretarian (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretarian (Kepegawaian, Perlengkapan					90%	90%	13.089.609.689	10.497.349.520			90%	13.252.500.000	

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

		dan Keuang an)												
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik					90%	90%					90%	
	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah					100%	100%					100%	

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas					90%	90%					90%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan					7 Dokumen	7 Dokumen	42.159.000	27.391.000			7 Dokumen	56.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	2 Dokumen	2 Dokumen	25.570.000	13.066.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	2 Dokumen	30.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA	Dokumen RKA	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	2 Dokumen	2 Dokumen	2.730.000	1.306.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	2 Dokumen	5.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan RKA Perubahan	Tersedianya dokumen perencanaan RKA Perubahan	RKA Prubahan	RKA Prubahan	Kota Makassar, Rappocini, Buakan a	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	1 Dokumen	3.444.000	2.544.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	1 Dokuman	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	DPA SKPD	DPA SKPD	Kota Makassar, Rappocini, Buakan a	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.000	1.125.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	1 Dokumen	2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA pokok	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA pokok	DPA perubahan SKPD	DPA perubahan SKPD	Kota Makassar, Rappocini, Buakan a	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	1 Dokumen	2.119.000	3.619.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	1 Dokuman	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan	Dokumen pelaporan	Dokumen evaluasi Renja dan LAKIP	Dokumen evaluasi Renja dan LAKIP	Kota Makassar, Rappocini, Buakan a	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	3 Dokumen	3 Dokumen	4.281.000	3.733.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	3 Dokumen	9.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja SKPD	Dokumen evaluasi kinerja SKPD			Kota Makassar, Rappocini, Buakan a	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	1 Dokumen	2.590.000	1.998.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	1 Dokumen	2.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

						Buakana								
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS					12 Bulan	12 Bulan	11.878.399.039	9.406.354.520			12 Bulan	11.785.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	12 Bulan	12 Bulan	11.641.699.039	9.150.334.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Bulan	11.500.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	236.700.000	256.020.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	12 Bulan	250.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	tersedianya laporan semesteran, Laporan kahir tahun, laporan Bulanan	tersedianya laporan semesteran, Laporan kahir tahun, laporan Bulanan			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15Dokuman	15Dokuman	0	0	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	15Dokuman	35.000.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya					121 Pasang	121 Pasang	<b>84.150.000</b>	<b>84.150.000</b>			121 Pasang	<b>85.000.000</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas pegawai	pakaian dinas pegawai	Kota Makassar, Rappocini, Buakanana	Kota Makassar, Rappocini, Buakanana	121 Pasang	121 Pasang	84.150.000	84.150.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	121 Pasang	85.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan bimbingan yang diikuti	Jumlah Pendidikan dan bimbingan yang					10 diklat	10 diklat	0	0			10 diklat	0	

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

		diikut i												
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran					100 %	100 %	257.598.000	221.598.000			100 %	314.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	alat-alat penerangan bangunan	alat-alat penerangan bangunan	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	8 jenis	8 jenis	4.578.000	4.578.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	8 jenis	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan komputer, laptop, scanner dan printer	Jumlah pengadaan komputer, laptop, scanner dan printer	Penyediaan alat tulis kantor dan perlengkapan kantor	Penyediaan alat tulis kantor dan perlengkapan kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jenis	4 Jenis	133.814.000	83.814.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	4 Jenis	165.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan alat rumah tangga	Jumlah pengadaan alat rumah tangga							0	0				0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bahan cetakan	bahan cetakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	5.206.000	5.206.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	12 Bulan	10.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	bahan bacaan	bahan bacaan	Kota Makassar, Rappocini, Buakan	Kota Makassar, Rappocini, Buakan	7 jenis	7 jenis	24.000.000	24.000.000	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7 jenis	24.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	rapat-kooridasi keluar daerah	rapat-kooridasi keluar daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 kali	9 kali	90.000.000	104.000.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	9 kali	110.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

				daerah	han	Kecamatan, Semua Kelurahan								
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran					100 %	100 %	0	0		100 %	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meja dan kursi kerja	Jumlah pengadaan meja dan kursi kerja	<b>pengadaan mebel</b>	<b>pengadaan mebel</b>			5 unit	5 unit	0	0		5 unit	0	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran							<b>376.031.100</b>	<b>368.989.500</b>			<b>508.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa persuratan yang di laksanakan	Jumlah jasa persuratan yang di laksanakan	jasa persuratan	jasa persuratan	Kota Makassar, Rappocini, Buakan	Kota Makassar, Rappocini, Buakan	12 bulan	12 bulan	141.981.600	141.981.600	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	12 bulan	275.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	listrik dan air	listrik dan air	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	145.883.000	138.841.400	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	12 Bulan	150.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan keamanan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan keamanan kantor	Keamanan dan kebersihan kantor	Keamanan dan kebersihan kantor	Kota Makassar, Rappocini, Buakanana	Kota Makassar, Rappocini, Buakanana	12 Bulan	12 Bulan	88.166.500	88.166.500	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	12 Bulan	83.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran					100 %	100 %	<b>451.272.550</b>	<b>388.866.500</b>			100 %	<b>419.000.000</b>

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	Mobil Jabatan	Mobil Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	35.572.000	33.798.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	12 Bulan	31.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi Jumlah pemeliharaan alat angkutan darat secara rutin/berkala	Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi Jumlah pemeliharaan alat angkutan darat secara rutin/berkala	kendaraan dinas	kendaraan dinas	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 unit 30 unit	30 unit 30 unit	335.040.550	293.508.500	Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	30 unit 30 unit	270.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat kantor secara rutin/berkala Jumlah pemeliharaan komputer secara rutin/berkala	Jumlah pemeliharaan alat kantor secara rutin/berkala Jumlah pemeliharaan komputer secara rutin/berkala	peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Makassar, Rappocini, Buakan	Kota Makassar, Rappocini, Buakan	22 unit	22 unit	80.660.000	61.560.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	22 unit 19 unit	85.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan bangunan	Jumlah kegiatan pemeliharaan bangunan	Gedung kantor	Gedung kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	12 Bulan	33.000.000
<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>461.968.600</b>	<b>530.357.600</b>			<b>100%</b>	<b>525.000.000</b>

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

		Dengan Ketentuan												
<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	Jumlah izin usaha yang difasilitasi	Jumlah izin usaha yang difasilitasi					340 unit	340 unit	38.322.000	51.045.000			340 unit	70.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah usaha yang diawasi dan dikendalikan	Jumlah usaha yang diawasi dan dikendalikan	Usaha Toko, swalayan	Usaha Toko, swalayan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340 unit	340 unit	38.322.000	51.045.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	340 unit	70.000.000
<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Jumlah gudang yang difasilitasi dan diawasi	Jumlah gudang yang difasilitasi dan diawasi							165.304.800	167.639.800				170.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang diawasi dan dikendalikan	Jumlah gudang yang diawasi dan dikendalikan	Gudang	Gudang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	440 Usaha	440 Usaha	165.304.800	167.639.800	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	440 Usaha	170.000.000
<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	Terfasilitasinya izin Waralaba	Terfasilitasinya izin Waralaba					460 Unit	460 Unit	<b>140.513.800</b>	<b>166.333.800</b>			460 Unit	<b>150.000.000</b>
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha Waralaba yang diawasi dan dikendalikan	Jumlah Usaha Waralaba yang diawasi dan dikendalikan	Usaha Waralaba	Usaha Waralaba	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	460 Unit Usaha	460 Unit Usaha	140.513.800	166.333.800	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	460 Unit Usaha	150.000.000
<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	Izin Usaha Minol yang terbit	Izin Usaha Minol yang terbit					110	110	<b>117.828.000</b>	<b>145.339.000</b>			110	<b>135.000.000</b>

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah usaha minuman beralkohol yang diawasi dan dikendalikan	Jumlah usaha minuman beralkohol yang diawasi dan dikendalikan	Pelaku usaha Minol	Pelaku usaha Minol	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 unit usaha	110 unit usaha	117.828.000	145.339.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	110 unit usaha	135.000.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik</b>					####	1.883.725.186	300.000.000				4.000.000.000	
<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Tersedianya pasar rakyat yang berstandar Nasional	Tersedianya pasar rakyat yang berstandar Nasional					-	-	1.883.725.186	300.000.000			1 unit	4.000.000.000
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi berstandar SNI	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi berstandar	Pasar	Pasar	Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang	Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang	0 pasar	3 pasar	1.883.725.186	300.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 pasar	4.000.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

		SNI													
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Penting dengan Harga Stabil	Persentase Barang Penting dengan Harga Stabil					80%	26%	243.560.000	342.450.000			26%	270.000.000	
	Persentase Barang Pokok dengan Harga Stabil	Persentase Barang Pokok dengan Harga Stabil					80%	18%					18%		
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	terkendalinya harga bahan kebutuhan pokok di pasar	terkendalinya harga bahan kebutuhan pokok di pasar					10 Pasar	10 Pasar	243.560.000	342.450.000			10 Pasar	270.000.000	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pasar yang diintervensi	Jumlah pasar yang diintervensi	Pemantauan Pasar	Pemantauan Pasar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 pasar	10 pasar	243.560.000	342.450.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	10 pasar	270.000.000	

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

						Kelu raha n								
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	Peningkatan Nilai Ekspor					- 600. 000. 000 \$	383.00 0.000 \$	347.461 .200	184.739.200			383.000.000 \$	906.043.620
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kota Makassar yang diselenggarakan	Jumlah Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kota Makassar yang diselenggarakan					60 Usaha	40 Usaha	347.461 .200	184.739.200			60 Usaha	906.043.620
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha produk ekspor Unggulan Kabupaten/Kota yang dibina dan dikembangkan	Jumlah Usaha produk ekspor Unggulan Kabupaten/Kota yang dibina	Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha Ekspor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Usaha	0 Usaha	45.859. 000	0	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	60 Usaha	188.964.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

		dan dikembangkan				Kelu raha n									
Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang Nasional yang dilaksanakan	Jumlah pameran dagang Nasional yang dilaksanakan	Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha Ekspor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Pameran	0 Pameran	115.963.000	0	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	1 Pameran	368.685.620	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan						0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160.500.000		
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan						0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94.482.000		

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah citra produk ekspor yang ditingkatkan	Jumlah citra produk ekspor yang ditingkatkan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94,482,000	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha Ekspor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Usaha	40 Usaha	185.639.200	184.739.200	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	40 Usaha	93.412.000	
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kemetrolgian</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kemetrolgian</b>					70	35%	228.390.800	235.432.400			35%	245.000.000	
<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	- Terkalibrasi alat-alat ukur yang digunakan oleh pelaku usaha	- Terkalibrasi alat-alat ukur yang digunakan oleh pelaku	UTTP	UTTP			1500 UTTP	525 UTTP	228.390.800	235.432.400			525 UTTP	245.000.000	

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

		usaha													
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTP yang dilayani dikantor Jumlah alat UTP yang dilayani di tempat pelaku usaha	Jumlah alat UTP yang dilayani dikantor Jumlah alat UTP yang dilayani di tempat pelaku usaha	UTTP	UTTP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 UTP 1500 UTP	525 UTP	145.284.600	152.326.200	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	525 UTP	160.000.000	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTP yang dikalibrasi	Jumlah alat UTP yang dikalibrasi	UTTP	UTTP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 UTP	525 UTP	83.106.200	83.106.200	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	525 UTP	85.000.000	

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal	Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal					27	4 Usaha	92.674.000	0			4 Usaha	250.000.000
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Produk usaha informal yang di promosikan	Produk usaha informal yang di promosikan					4 Usaha	0 Usaha	92.674.000	0			4 Usaha	250.000.000
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran Promosi Perdagangan	Terlaksananya Pameran Promosi Perdagangan	Usaha Informal	Usaha Informal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 pameran	0 pameran	92.674.000	0	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	1 pameran	250.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									2.270.610.525	1.133.843.525				2.050.000.000

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Industri Kecil Menengah	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar					70	350 IKM	2.028.837.725	892.070.725			350 IKM	1.820.000.000	
		Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian					-	350 Orang					350 Orang		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai produksi IKM yang mendapatkan Binaan	Meningkatnya nilai produksi IKM yang mendapatkan Binaan					350 IKM	350 IKM	2.028.837.725	892.070.725			350 IKM	1.820.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Musyawarah Nasional yang diikuti Jumlah pameran Dekranasda yang diikuti	Jumlah Musyawarah Nasional yang diikuti Jumlah	IKM	IKM	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Kota	1 Pameran 3 Pameran	0 Pameran 0 Pameran	546.887.000	0	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	1 Pameran 3 Pameran	470.000.000	

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

		pameran Dekranasda yang diikuti				Semua Kelurahan									
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pameran industri kecil/menengah yang diikuti	Jumlah pameran industri kecil/menengah yang diikuti	IKM	IKM	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Pameran Promosi	2 Pameran Promosi	290.559.000	145.666.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	2 Pameran Promosi	300.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pengrajin perak yang di bina Waktu operasional UPTD	Pengrajin perak yang di bina Waktu operasional UPTD	Operasional UPTD Penyamaan Kulit	Operasional UPTD Penyamaan Kulit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 usaha 12 Bulan	0 usaha 12 Bulan	643.351.725	525.351.725	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	10 usaha 12 Bulan	650.000.000	

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Perajin Daerah yang mengikuti pelatihan peningkatan Jumlah Perajin Home Industri yang dibina	Jumlah Perajin Daerah yang mengikuti pelatihan peningkatan Jumlah Perajin Home Industri yang dibina	IKM	IKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang	100 orang	548.040.000	221.053.000	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	200 orang 150 orang	400.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Makassar	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Makassar					####	####	241.772.800	241.772.800			####	230.000.000	
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Indust					####						####		

LKJIP 2021 DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

		ri (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait												
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	terfasilitasi nya perizinan bagi Usaha industri kecil dan menengah	terfasilitasi nya perizinan bagi Usaha industri kecil dan menengah	Izin IKM	Izin IKM			100 Usaha	100 Usaha	241.772.800	241.772.800			100 Usaha	230.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data IKM	Jumlah data IKM	Data IKM	Data IKM	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semu	360 IKM	360 IKM	241.772.800	241.772.800	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	360 IKM	230.000.000

